



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021**



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Kota Dumai

Telp. (0765) 438880 Fax (0765) 438080

DUMAI

**KEPUTUSAN
WALIKOTA DUMAI**

NOMOR : 34 /SK/DPPPA/2020

T E N T A N G

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

WALIKOTA DUMAI

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan budaya kerja dan etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas;
- b. Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyusunan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta mewujudkan Good Governance perlu disusun dan disampaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Daerah Kota Dumai Nomor 8 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 23 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021;

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 adalah Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 merupakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi, menjamin komitmen dan konsistensi perencanaan dan program serta kegiatan sebagai landasan dalam penentuan program dan kegiatan tahunan serta acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I
Pada tanggal : 24 September 2020

An. WALIKOTA DUMAI
KEPALA,



DAMERIA, SKM, M. Si
NIP. 19640605 198603 2 006

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016-2021. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk mewujudkan *Visi Kota Dumai “Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”*.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan Rencana Kerja dan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui target rencana kerja dan pencapaian kinerja ini untuk lebih meningkatkan kinerja serta kerja sama semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Dumai, 24 September 2020

Kepala,



DAMERIA SKM, M. Si
NIP. 19640605 198603 2 006

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 3 |
| Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 27 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 30 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 36 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 46 |
| Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI..... | 48 |
| 3.1 TelaahaanTerhadapKebijakan Nasional | 48 |
| 3.2 Tujuan dan SasaranRencanaKerjaDinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | 51 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 52 |
| Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 69 |
| Bab V PENUTUP | 76 |
| 5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian..... | 76 |
| 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut | 77 |
| LAMPIRAN I : Pemutakhiran Program dan Kegiatan Renstra/RPJMD kedalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini merupakan perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pagu indikatif.

Proses penyusunan Rencana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja; (3) Penyusunan Rancangan Renja; (4) Pelaksanaan Forum/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja; (6) Penetapan Renja.

Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Dumai;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 adalah :

1. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di Rencana Kerja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan Realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Rencana Kerja Tahun berjalan.

Berikut ini merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2019 dan realisasi APBD DPPPA Kota Dumai Tahun 2020 :

2.1.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu :

Semua program kegiatan memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

2.1.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar RP. 50.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 50.850.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 121.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.192.733 atau 81,84% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik dengan target 12 bulan atau 100%.

3) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.11.388.000 dan terealisasi sebesar Rp.11.386.000 atau 99,98% dengan indikator keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 100% dan terealisasi 100%.

- 4) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.400.000 dan terealisasi sebesar Rp.8.647.000 dengan indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 5) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.49.352.675 dan terealisasi Rp.48.733.450 atau 98.75% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.79.931.455 dan terealisasi Rp.79.168.035 atau 99.04% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 7) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.67.147.670 dan terealisasi Rp.66.690.400 atau 99.32% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 8) Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.8.682.100 dan terealisasi Rp.8.681.350 atau 99.99% dengan indikator keluaran adalah tersedianya komponen instalansi listrik/

penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%.

- 9) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.500.000 dan terealisasi Rp.8.520.000 atau 81.14% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan dan informasi bagi aparatur dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 10) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.20.460.000 dan terealisasi Rp.20.460.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya makan dan minum rapat dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%, serta tersedianya makanan dan minuman tamu dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 11) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.296.448.000 dan terealisasi Rp.296.448.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- 12) Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.43.545.000 dan terealisasi Rp.43.519.998 atau 99.94% dengan indikator keluaran adalah tersedianya pelayanan pengamanan perkantoran dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.117.000.000 dan terealisasi Rp.119.139.000 atau 99.29% dengan indikator keluaran adalah tersedianya sarana dan prasarana

kantor dengan target 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit atau 100%.

- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.600.000 dan terealisasi Rp.9.600.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya perlengkapan kantor yang dapat berfungsi dengan baik dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- 3) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.750.000 dan terealisasi Rp.9.750.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- 4) Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi Rp. 69.857.000 atau 99.80% dengan indikator keluaran adalah tersedianya sarana kerja yang layak dengan target 1 paket dan terealisasi 100%.
- 5) Pemeliharaan rutin berkala/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.480.000 dan terealisasi Rp. 128.480.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya kebutuhan kendaraan dinas operasional dan terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.31.415.000 dan terealisasi Rp.31.415.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersusunnya Dokumen LKj-IP, LPPD,

LKPJ dan RENSTRA dengan target 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%.

2) Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.527.000 dan terealisasi Rp.19.192.000 atau 98.28% dengan indikator keluaran adalah tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan perubahan dengan target 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.

3) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.545.000 dan terealisasi Rp.5.545.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1) Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.41.035.470 dan terealisasi Rp.40.486.870 atau 98.66% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya kegiatan lokakarya agenda politik perempuan dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1) Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.373.971.510 dan terealisasi Rp.367.487.906 atau 98.27% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta

terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100%.

- 2) Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.31.872.495 dan terealisasi Rp.25.872.495 atau 81.17% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- 3) Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.98.160.000 dan terealisasi Rp.97.004.300 atau 98.82% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan Forum Anak 2019-2021 dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- 4) Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.173.264.000 dan terealisasi Rp.172.691.163 atau 99.67% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak dengan target 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%.

- 5) Evaluasi pelaksanaan PUG

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.99.620.000 dan terealisasi Rp.85.498.700 atau 85.82% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

- 6) Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.177.487.420 dan terealisasi Rp.173.360.141 atau 97.67%

dengan indikator keluaran adalah tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta tersedianya media informasi dengan target 55% dan terealisasi sebesar 100%.

- 7) Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.198.668.800 dan terealisasi Rp.198.050.526 atau 99.69% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 50 kasus dan terealisasi sebanyak 50 kasus atau 100%.

- 8) Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.161.700.000 dan terealisasi Rp.160.649.856 atau 99.35% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target 20 PATBM dan terealisasi sebanyak 20 Aktivistis PATBM atau 100%.

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- 1) Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.113.459.000 dan terealisasi Rp.113.362.000 atau 99.91% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- 2) Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.49.157.500 dan terealisasi Rp.48.171.124 atau 97.99% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

- 3) Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.171.414.000 dan terealisasi Rp.169.749.340 atau 99.03% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dengan target 35 orang dan terealisasi sebanyak 35 orang atau 100%.

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- 1) Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.353.939.830 dan terealisasi Rp.344.775.439 atau 97.41% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan dengan target 35 organisasi dan terealisasi sebanyak 35 organisasi atau 100%, terlaksananya peringatan seminar , dan lomba dalam rangka hari kartini dan hari ibu dengan target 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100%.
- 2) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.65.673.000 dan terealisasi Rp.65.473.623 atau 99.70% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) dengan target 10 kelurahan dan terealisasi sebanyak 10 kelurahan atau 100%, serta terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target 1 kecamatan dan terealisasi 100%.

- 3) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.533.500 dan terealisasi Rp. 86.263.500 atau 84,96 % dengan indikator keluaran adalah terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dengan target 7 Kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 Kecamatan atau 100%.

8. Program penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah

- 1) Kegiatan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi Rp. 46.556.300 atau 93,11% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha dengan target 3 kegiatan dan terealisasi 100%.

9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- 1) Kegiatan peningkatan manajemen aset / barang daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi Rp. 29.999.004 atau 100% dengan indikator keluaran adalah peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah dengan target 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.

2.1.3 Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran dari yang direncanakan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Tidak ada program/ kegiatan yang tidak terpenuhi maupun melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan

- 1) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kepala Dinas dan jajaran yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan.
- 3) Telah terjalinnya kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah terkait
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah

1. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Sumber Daya Manusia pendamping dan manajer kasus
2. Bertambahnya sarana pendukung kelancaran tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik serta meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak
4. Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera

2.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Membangun kerjasama team work
2. Melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang sudah dilakukan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan program/ kegiatan yang belum/ tidak tercapai
3. Merumuskan dan membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program/ kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2020 | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | WAJIB | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 01 | | | | |
| | Penyediaan jasa surat- menyurat | Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (3 Orang) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 02 | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 90% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 03 | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 06 | | | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 80% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | Tersedianya Komponen listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 95% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik kantor (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makan Dan Minum Rapat (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Tersedianya Tenaga pengamanan kantor (2 orang) (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | 01 | 20 | Penyediaa jasa pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah jasa tenaga keamanan perkantoran (10 orang) | 12 | - | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 03 | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (gedung) | 1 gedung | - | - | - | - | - | - | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya sarana dan prasarana Kantor (Unit) | 6 | 5 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor (unit) | 3 | | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 21 | Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas | terpeliharanya rumah dinas (unit) | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas operasional | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 41 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Tersedianya sarana kerjayang layak (paket) | 1 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Tersedianya sarana kerja yang layak (Paket) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparaturnya | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Seragam Security | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu | Tersedianya Pakaian Seragam MTQ | 48 | 48 | 48 | 48 | 100% | 48 | 48 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 05 | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kebutuhan Jabatan (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 05 | 03 | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Sumber Daya Manusia tentang Peraturan Perundang-undangan (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ, dan Renstra (Dokumen) | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 15 | | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase perempuan yang duduk dilegislatif | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% | 18% | 18% | 100% | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 15 | 02 | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | 1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan (orang) | 80 orang | 80 orang | 80 orang | 80 orang | 100% | 20 orang | 20 orang | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 03 | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | 1. Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terlaksananya pendataan gender, dan anak (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 3. Terselenggaranya peningkatan kapasitas organisasi perempuan (Kegiatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 04 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) (orang) | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100% | 100 orang | 100 orang | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 05 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 1. Terselenggaranya pembentukan dan penguatan Forum Anak 2019-2021 | 41 Forum Anak Dumai | 22 Forum Anak Dumai | 22 Forum Anak Dumai | 22 Forum Anak Dumai | 100% | 41 Forum Anak Dumai | 41 Forum Anak Dumai | 100% |
| | | | | | | | | 2. Pembinaan forum anak | 41 Forum Anak Dumai | | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | 3. penguatan forum anak | 50 orang | | | | | | | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 06 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | 1. Terselenggaranya Bimbingan teknis sekolah Ramah Anak | 40 Sekolah | 16 Sekolah | 16 Sekolah | 16 Sekolah | 100% | 30 orang | 30 orang | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terselenggaranya Bimbingan teknis informasi layak anak | 40 orang | | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | 3. Pembinaan kecamatan layak anak | 7 kecamatan | | | | | | | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 07 | Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (orang) | 100 | 100 | 20 orang | 20 orang | 100% | 20 orang | 20 orang | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 08 | Pengembangan sistem informasi gender dan anak | 1. Tersedianya Profil data Gender dan Anak serta Kelembagaan Perempuan dan Anak(Dokumen) | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | | | | | | | Tersedianya Media Informasi (Persen) | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 13 | Pengembangan Pusat Layanan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak | 1. Terlaksananya Pendampingan Kasus kekerasan pada Perempuan Dan Anak (kasus) | 120 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 100% | 50 kasus | 50 kasus | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas manager kasus dan SDM pendampingan dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang) | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 14 | Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | 1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (Kelurahan) | 25 Kelurahan | 15 Kelurahan | 15 Kelurahan | 15 Kelurahan | 100% | 15 Kelurahan | 15 Kelurahan | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terselenggaraanya bimbingan teknis konvensi hak anak | 50 orang | - | - | - | 100% | 50 orang | 50 orang | 100% |
| | | | | | | | | 3. Terselenggaranya bimtek replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | 80 orang | - | - | - | 100% | 50 orang | 50 orang | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 17 | | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 17 | 01 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | 1. Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan (orang) | 100 | | 50 | 50 | 100% | 35 orang | 35 orang | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan (Orang) | 30 orang | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 17 | 02 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan TPPO | Telaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (orang) | 150 orang | 100 | 100 | 100 | 100% | 120 orang | 120 orang | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 17 | 11 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | 1. Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (orang) | 100 orang | 100 | 100 | 100 | 100% | 20 orang | 20 orang | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terlaksananya Forum koordinasi kesetaraan gender (Orang) | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 17 | 13 | Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 18 | | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintah dan masyarakat kota Dumai | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 18 | 01 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | 1. Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi) | 45 Oganisasi | 30 Oganisasi | 35 Organisasi | 35 Organisasi | 100% | 40 Organisasi | 40 Organisasi | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terlaksananya Peringatan hari Kartini dan hari Ibu (Kegiatan) | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 18 | 03 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera | 1. Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai | 33 kelurahan | 17 Kelurahan | 10 Kelurahan | 10 Kelurahan | 100% | 10 Kelurahan | 10 Kelurahan | 100% |
| | | | | | | | | 2. Terlaksananya Penyuluhan bagi ibu rumaha tangga (Kecamatan) | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 100% | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 18 | 04 | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Kecamatan) | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 100% | 7 Kecamatan | 7 Kecamatan | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 04 | 01 | 35 | Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya informasi OPD PPPA | 80% | 70% | 75% | 75% | 100% | 78% | 78% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 04 | 01 | 35 | 03 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha (Kegiatan) | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 100% | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 04 | 01 | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Dokumen Aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan tertata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 02 | 2 | 04 | 01 | 17 | 16 | Peningkatan manajemen aset. Barang/ Daerah | Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah (dokumen) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |

Dumai, 24 September 2020
KEPALA,



DAMERIA, SKM, M. Si
NIP. 19640605 198603 2 006

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merujuk pada Bab VIII Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2019 sesuai revisi RPJMD 2016 – 2021 sebagai berikut :

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar

Ada beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
2. Pengembangan Pusat Layanan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 85%, sedangkan tahun 2020 dengan target 90 %.

- b. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 dengan target sebesar 54,01%, sedangkan tahun 2020 , dengan target 54,85%.

Ada beberapa kegiatan yang mendukung indicator kinerja di atas antara lain:

1. Perumusan kebijakan peningkatan peran serta dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan public
2. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
3. Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga

4. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
5. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

c. Indeks Pembangunan Gender

Tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai dengan target sebesar 88 sedangkan pada tahun 2020 dengan target sebesar 89. Kegiatan yang mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender adalah kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.

d. Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada tahun 2019 capaian kota layak anak untuk kota Dumai mendapat predikat Madya (belum mencapai target yang diinginkan) yaitu predikat Nindya sesuai dengan target capaian kota layak anak pada tahun tersebut.

Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

e. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO

Tahun 2019 persentase perempuan terhadap tindakan kekerasan termasuk TPPO dengan target sebesar 0,095 %, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 0,090 %.

Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
2. Pengembangan Pusat Layanan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil analisis kinerja Pelayanan SKPD disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai seperti tersebut di bawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

| No | Indikator | SATUAN | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 2018 (thn n-2) | 2019 (thn n-1) | 2020 (tnn n) | 2021 (thn n+1) | 2018 (thn n-2) | 2019 (thn n-1) | 2020 (thn n) | 2021 (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar | % | | Indeks Pembangunan Gender | 80 | 85 | 90 | 91 | 82,76 | 92,8 | 90 | 91 | |
| 2 | Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan | % | | | 53,05 | 54,01 | 54,85 | 55,01 | 54,85 | - | 54,85 | 55,01 | |
| 3 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | | | 87 | 87 | 88 | 90 | 90,52 | - | 88 | 90 | |
| 4 | Capaian Kota Layak Anak (KLA) | Predikat | | | Madya | Nindya | Nindya | Nindya | Madya | Madya | Nindya | Nindya | |
| 5 | Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO | % | | | 0,100 | 0,095 | 0,090 | 0,085 | 0,02 | 0,03 | 0,090 | 0,085 | |

Dumai, 24 September 2020
KEPALA,



DAMERIA SKM, M. Si
NIP. 19640605 198603 2 006

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. *Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai*

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Indeks Pembangunan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang bagus, dengan realisasi kinerja sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu dari 88 menjadi 90,52 (melebihi target). Salah satu indikator penting dalam pengukuran IPG adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bersama angka kesakitan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

B. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total jumlah perempuan usia kerja. Target dari indikator sasaran ini yaitu 53.05 % dengan realisasi capaian capaian pada tahun 2019 sebesar 54.85% atau sebanyak 11.918 jiwa perempuan yang bekerja dari 22.867 jiwa penduduk perempuan usia kerja. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 52.12103% (melebihi target).

C. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar mengalami peningkatan dibanding

tahun sebelumnya yaitu 82.76% pada tahun 2019 menjadi 92.8% (melebihi target kinerja) pada tahun 2019 atau sebanyak 121 kasus yang telah mendapatkan penanganan sesuai standar dari 129 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain layanan konseling sebanyak 40 kasus, layanan konsultasi hukum 6 kasus, konsultasi psikologis 10 kasus, pendampingan pembuatan BAP rekam kasus oleh P2TP2A sebanyak 40 kasus serta pembahasan tindak lanjut kasus kekerasan dalam bentuk coffe morning/bedah kasus sebanyak 6 kali dengan melibatkan lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, Lapas, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PKK Kota dan Kecamatan/Kelurahan.

D. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO.

Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO di Kota Dumai pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 48 kasus pada tahun 2017 atau sebesar 0.03% menjadi 32 kasus pada tahun 2018 atau sebesar 0.02%. Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 0.100%. Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Dumai sebanyak 12 kasus. Sebagai tindak lanjut penanganan KDRT, melalui APBD kota Dumai Tahun 2018 maka Dinas PPPA telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi perempuan korban KDRT yang diistilahkan sebagai orang yang selamat (survivor), didampingi oleh tim P2TP2A Kota Dumai dengan jumlah peserta 20 orang. Survivor tetap membutuhkan proses pemulihan jangka panjang untuk terus memupuk pertumbuhan pribadi dan kekuatan dirinya. Kemampuan keluar dari trauma KDRT inilah yang dapat menjadi indikator keberhasilan penanganan KDRT secara menyeluruh.

E. Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada Tahun 2018 capaian Kota Layak Anak untuk Kota Dumai masih dalam predikat Madya. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 untuk pencapaian Kota Layak Anak antara lain melakukan

bimbingan teknis konvensi hak anak , bimbingan teknis Puskesmas Ramah Anak bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) pada 2 kelompok PATBM yang berjumlah 20 aktivis, masing- masing berasal dari kelurahan Purnama dan kelurahan STDI. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan serta penanganan kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga – tenaga ahli dan professional dibidangnya seperti Psikolog, Psikiater, serta tenaga ahli lainnya.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
- 4) Belum optimalnya pendataan gender dan anak di Kota Dumai yang disebabkan karena belum semua Perangkat Daerah terkait menggunakan system data terpilah.

b. Hambatan yang dihadapi

Terbatasnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga belum semua program-program

kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi Kota Dumai yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”** dan Misi ke-4 **“Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.”**

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota Dumai, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif untuk memacu pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke -4 Pemerintah Kota Dumai yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.”** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah meningkatnya kualitas pembangunan gender, dengan sasaran yaitu meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima

tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- 3) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- 2) UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender.
- 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- 4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan

Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) .

- 5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- 6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- 7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. *Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.*

Adapun rekomendasi dan strategis dilakukan dalam merumuskan program dan kegiatan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, meningkatkan partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif, mengadvokasi pimpinan Partai Politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon legislatif, fasilitasi pembentukan *gender champion*, pemberian pelatihan keterampilan bantuan alat bagi kelompok rentan, meningkatkan kapasitas perencanaan dalam PPRG, meningkatkan cakupan ARG dalam APBD dan memperkuat kelembagaan PUG serta pemanfaatan data terpilah.
- b. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, melalui :
 - 1) Penguatan regulasi dalam penanganan kasus termasuk penegakan hukum yang berkeadilan.

- 2) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
 - 3) Peningkatan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 4) Pemulihan korban reintegrasi sosial.
 - 5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penanganan korban.
 - 6) Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.
- c. Mempercepat capaian peringkat Kota Layak Anak melalui :
- 1) Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak.
 - 2) Penguatan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pencapaian Kota Layak Anak .
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
 - 4) Advokasi kepada Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
 - 5) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di Kota Dumai.
- d. Meningkatkan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui harmonisasi berbagai kebijakan perlindungan khusus anak, memperkuat lembaga/ jejaring pemenuhan hak anak di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak, menguatkan kapasitas anak berkebutuhan khusus, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta memperkuat keberdayaan anak berkebutuhan khusus agar setara dengan anak-anak lainnya.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat implementasi PUG melalui workshop perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat kota, memperkuat lembaga/ jejaring PUG di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak.
- f. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penyediaan sarana dan prasarana penguatan regulasi dan perbaikan layanan penunjang tugas dan fungsi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel T-C.31 berikut ini :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KOTA DUMAI

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | .I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota Dumai | Outcome Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor | 100% | 1.370.977.116 | I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota Dumai | Outcome Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor | 100% | 1.524.311.546 | |
| | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | | Output Terlaksananya penyediaan surat menyurat | 12 | 5.438.973 | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | | Output Terlaksananya penyediaan surat menyurat | 12 | 5.438.973 | |
| | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Output Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (Bulan) | 12 | 126.060.000 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Output Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik (Bulan) | 12 | 126.060.000 | |
| | 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Output Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | 12 | 19.240.000 | 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Output Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | 12 | 19.240.000 | |
| | 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | Output Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan) | 12 | 26.760.000 | 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | Output Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan) | 12 | 26.760.000 | |
| | 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | Output Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan) | 12 | 54.265.570 | 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | Output Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan) | 12 | 171.600.000 | |
| | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Output Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan) | 12 | 85.619.903 | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Output Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan) | 12 | 85.619.903 | |
| | 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Output Tersedianya kebutuhan Barang cetak dan penggandaan (Bulan) | 12 | 73.007.670 | 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Output Tersedianya kebutuhan Barang cetak dan penggandaan (Bulan) | 12 | 73.007.670 | |
| | 8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | | Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor (Bulan) | 12 | 23.000.000 | 8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | | Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor (Bulan) | 12 | 23.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| | 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Output Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi aparatur (Bulan) | 12 | 15.360.000 | 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Output Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi aparatur (Bulan) | 12 | 15.360.000 |
| | 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | Output Tersedianya Makan Dan Minum Rapat (Bulan) | 12 | 30.360.000 | 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | Output Tersedianya Makan Dan Minum Rapat (Bulan) | 12 | 30.360.000 |
| | 11 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | | Output Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara (Bulan) | 12 | 621.000.000 | 11 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | | Output Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara (Bulan) | 12 | 621.000.000 |
| | 12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | | Output Tersedianya jasa Tenaga keamanan kantor (6 orang) (Bulan) | 12 | 130.065.000 | 12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | | Output Tersedianya jasa Tenaga keamanan kantor (6 orang) (Bulan) | 12 | 130.065.000 |
| | 13 | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | | Output Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (10 orang) (Bulan) | 12 | 160.800.000 | 13 | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | | Output : Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (10 orang) (Bulan) | 12 | 196.800.000 |
| 2 | II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Kota Dumai | Outcome Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana aparatur | 100% | 2.161.405.551 | II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kota Dumai | Outcome Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana aparatur | 100% | 2.257.405.551 | |
| | 1 | Pembangunan gedung kantor | | Output: tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota | 1 gedung | 1.708.035.909 | 1 | Pembangunan gedung kantor | | Output: tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | 1 gedung | 1.708.035.909 |
| | 2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Output: tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) | 3 unit | 32.500.000 | 2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Output: tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) | 3 unit | 45.000.000 |
| | 3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Output Tersedianya sarana dan prasarana Kantor (Unit) | 6 unit | 36.719.642 | 3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Output Tersedianya sarana dan prasarana Kantor (Unit) | 6 unit | 80.219.642 |
| | 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal | | Output tersedianya Kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional dan terpenuhnya jasa supir kendaraan dinas (Bulan) (2 Orang) | 12 bulan 12 bulan | 136.080.000 | 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal | | Output tersedianya Kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional dan terpenuhnya jasa supir kendaraan dinas (Bulan) (2 Orang) | 12 bulan 2 orang | 176.080.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| | 5 | Pemeliharaan rutin berkala/berkala perlengkapan gedung kantor | | Output: Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan) | 12 | 14.460.000 | 5 | Pemeliharaan rutin berkala/berkala perlengkapan gedung kantor | | Output: Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik (Bulan) | 12 | 14.460.000 | |
| | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | Output : Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan) | 12 | 14.610.000 | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | Output : Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik (Bulan) | 12 | 14.610.000 | |
| | 7 | Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas | | Output : Terpeliharanya rumah dinas | 1 | 9.000.000 | 7 | Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas | | Output : Terpeliharanya rumah dinas | | 9.000.000 | |
| | 8 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | | Output : Tersedianya sarana kerja yang layak | 1 paket | 10.000.000 | 8 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | | Output : Tersedianya sarana kerja yang layak | 1 | 10.000.000 | |
| | 9 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Output : Tersedianya sarana kerja yang layak (paket) | 1 paket | 100.000.000 | 9 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Output : Tersedianya sarana kerja yang layak (paket) | 1 paket | 100.000.000 | |
| | 10 | Pengadaan Mebeleur | | Output : Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor | 3 Unit | 100.000.000 | 10 | Pengadaan Mebeleur | | Output : Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor | 3 Unit | 100.000.000 | |
| 3 | III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Kota Dumai | Outcome Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | 36.120.000 | III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Kota Dumai | Outcome Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | 63.860.000 | | |
| | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | Output Tersedianya Pakaian Seragam Security | 2 stel | 7.260.000 | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | Output Tersedianya Pakaian Seragam Security | 2 stel | 35.000.000 | |
| | 2 | Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu | | Output Tersedianya Pakaian Seragam MTQ | 48 stel | 28.860.000 | 2 | Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu | | Output Tersedianya Pakaian Seragam MTQ | 48 stel | 28.860.000 | |
| 4 | IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | Kota Dumai | Outcome : Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 37.220.000 | IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Kota Dumai | Outcome : Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 37.220.000 | | |
| | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Output : Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kebutuhan Jabatan (Bulan) | 12 | 14.860.000 | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Output : Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kebutuhan Jabatan (Bulan) | 12 | 14.860.000 | |
| | 2. | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | Output : Meningkatnya Sumber Daya Manusia tentang Peraturan Perundang-undangan (Bulan) | 12 | 22.360.000 | 2. | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | Output : Meningkatnya Sumber Daya Manusia tentang Peraturan Perundang-undangan (Bulan) | 12 | 22.360.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 5 | V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kota Dumai | Outcome Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan | 4 | 71.109.500 | V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kota Dumai | Outcome Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan | 4 | 95.109.500 | |
| | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Output Tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ dan Renstra (Dokumen) | 4 | 36.275.000 | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Output Tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ dan Renstra (Dokumen) | 4 | 60.275.000 | |
| | 2 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Output Tersusunnya rencana kerja anggaran murni | 2 | 24.422.000 | 2 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Output Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan | 2 | 24.422.000 | |
| | 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Output Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | 1 | 10.412.500 | 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Output Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | 1 | 10.412.500 | |
| 6 | VI. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | Kota Dumai | Outcome : Persentase perempuan yang duduk di legislatif | 18% | 169.160.400 | VI. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | Kota Dumai | Outcome : Persentase perempuan yang duduk di legislatif | 18% | 169.160.400 | |
| | 1 | Perumusan kebijakan peningkatan peran posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan | | 169.160.400 | 1 | Perumusan kebijakan peningkatan peran posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan | | 169.160.400 | |
| 7 | VII. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Kota Dumai | Outcome Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat | 85% | 1.982.157.000 | VII. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Kota Dumai | Outcome Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat | 85% | 1.982.157.000 | |
| | 1 | Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | 1. Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak (dokumen) 2. Terlaksananya pendataan gender, dan anak (dokumen) 3. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan (Kegiatan) | 1 1 1 | 419.840.000 | 1 | Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | 1. Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak (dokumen) 2. Terlaksananya pendataan gender, dan anak (dokumen) 3. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan (Kegiatan) | 1 1 1 | 419.840.000 | |
| | 2 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Output :: Terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) (orang) | 100 | 104.860.000 | 2 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Output : Terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) (orang) | 100 | 104.860.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| | 3 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Output : 1. Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak Kota 2. terselenggaranya penguatan forum anak 3. Terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan Forum Anak 2019 - 2021 | 41 forum anak 50 orang 41 forum anak | 203.000.000 | 3 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Output : 1. Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak Kota 2. terselenggaranya penguatan forum anak 3. Terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan Forum Anak 2019 - 2021 | 41 forum anak 50 orang 41 forum anak | 203.000.000 | |
| | 4 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Output : 1. Terselenggaranya Pembinaan kecamatan layak anak 2. Terselenggaranya bimbingan teknis informasi layak anak 3. Terselenggaranya bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak | 7 kecamatan 40 orang 40 sekolah | 278.000.000 | 4 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Output : 1. Terselenggaranya Pembinaan kecamatan layak anak 2. Terselenggaranya bimbingan teknis informasi layak anak 3. Terselenggaranya bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak | 7 kecamatan 40 orang 40 sekolah | 278.000.000 | |
| | 5 | Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) | Output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (orang) | 100 orang | 156.000.000 | 5 | Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) | Output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (orang) | 100 orang | 156.000.000 | |
| | 6 | Pengembangan sistem informasi gender dan anak | Output : 1. Tersedianya Profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak (Dokumen) | 1 | 223.941.000 | 6 | Pengembangan sistem informasi gender dan anak | Output : 1. Tersedianya Profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak (Dokumen) | 1 | 223.941.000 | |
| | | | 2. Tersedianya media informasi (persen) | 75% | | | | 2. Tersedianya media informasi (persen) | 75% | | |
| | 7 | Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Output : 1. Terlaksananya Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak | 120 kasus | 330.016.000 | 7 | Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Output : 1. Terlaksananya Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak | 120 kasus | 330.016.000 | |
| | 8 | Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | 1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) 2. Terselenggaranya bimbingan teknis konveksi hak anak 3. Terselenggaranya bimtek replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | 25 kelurahan 50 orang 80 orang | 266.500.000 | 8 | Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | 1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) | 50 orang 80 orang | 266.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| 8 | VIII. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | Kota Dumai | Outcome : Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan | 85% | 702.523.325 | VIII. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | Kota Dumai | Outcome : Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan | 85% | 702.523.325 | |
| | 1 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | | Output 1. Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan (orang) 2. Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan | 100 orang 30 orang | 176.310.000 | 1 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | | Output 1. Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan (orang) 2. Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan | 100 orang 30 orang | 176.310.000 | |
| | 2 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan TPPO | | Telaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (orang) | 150 orang | 118.319.000 | 2 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan TPPO | | Telaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (orang) | 150 orang | 118.319.000 | |
| | 3 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | | Output Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (orang) | 100 orang | 112.894.325 | 3 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | | Output Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (orang) | 100 orang | 112.894.325 | |
| | 4 | Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | | Output : Terlaksananya fasilitas upaya pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di Kelurahan | 20 Kelurahan | 295.000.000 | 4 | Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | | Output : Terlaksananya upaya pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di Kelurahan | 20 Kelurahan | 295.000.000 | |
| 9 | IX. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | | Kota Dumai | Outcome : Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai | 70% | 763.791.450 | IX. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | Kota Dumai | Outcome : Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai | 70% | 763.791.450 | |
| | 1 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | | Output : 1. Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi) 2. Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu (Kegiatan) | 45 organisasi 2 kegiatan | 447.500.000 | 1 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | | Output : 1. Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi) 2. Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu (Kegiatan) | 45 organisasi 2 kegiatan | 447.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| | 2 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Output : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu | 7 kecamatan | 165.788.450 | 2 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Output : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga | 7 kecamatan | 165.788.450 |
| | | | 2. Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai (kelurahan) | 33 kelurahan | | | | 2. Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai (kelurahan) | 33 kelurahan | |
| | 3 | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Output Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kecamatan) | 7 kecamatan | 150.503.000 | 3 | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Output Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kecamatan) | 7 kecamatan | 150.503.000 |
| 10 | X.. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | Outcome Persentase tersedianya informasi Pemerintah Daerah | 80% | 100.000.000 | XI. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | Outcome Persentase tersedianya informasi Pemerintah Daerah | 80% | 100.000.000 | |
| | 1 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | Output Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha | 3 kegiatan | 100.000.000 | 1 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | Output Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha | 3 kegiatan | 100.000.000 |
| 11 | XI. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | Outcome Dokumen Aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata | 2 dokumen | 30.000.000 | XI. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | Outcome Dokumen Aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata | 2 dokumen | 30.000.000 | |
| | 1 | Peningkatan manajemen aset. Barang/ daerah | Output Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah (dokumen) | | 30.000.000 | 1 | Peningkatan manajemen aset. Barang/ daerah | Output Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah (dokumen) | | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 7.424.464.342 | | | | 7.725.538.772 | |

Dumai, 24 September 2020
KEPALA ,


DAMERIA, SKM, M.Si
NIP. 19640605 198603 2 006

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan publik, maupun didasarkan dari hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD.

Maka hasil Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan berdasarkan usulan dari unit Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dijelaskan dalam tabel T-C.32 berikut ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun 2020

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Dumai, 24 September 2020
KEPALA,



DAMERIA, SKM, M. Si
NIP. 19640605 198603 2 006

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021 terkait Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :

A. Arah kebijakan pemberdayaan perempuan

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

B. Arah kebijakan perlindungan anak.

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal.
- 2) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- 3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Sedangkan sasaran kebijakan RPJMN, sebagai berikut:

1. Sasaran Pemberdayaan Perempuan.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, Sumber Daya Manusia yang terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar K/ L/ SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

2. Sasaran Perlindungan Anak

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisi rentan terhadap layanan yang dibutuhkan

- b. Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- c. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan pasal 258 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target”, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai memiliki urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada arah kebijakan nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Agar sinkronisasi dan harmonisasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat terwujud maka diperlukan adanya penyelarasan kegiatan prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/ Lembaga (APBN) dengan kegiatan pendukung dari daerah yang bersumber dari APBD. Adapun 10 (sepuluh) prioritas nasional dan 30 (tiga puluh) program prioritas Nasional tahun 2018 adalah sebagai berikut :

I. Pendidikan

1. Pendidikan vokasi.
2. Peningkatan kualitas guru

II. Kesehatan

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit
3. Preventif dan promotif (gerakan masyarakat hidup sehat)

III. Perumahan dan pemukiman

1. Penyediaan perumahan layak
2. Air bersih dan sanitasi

IV. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata

1. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
2. Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10)
3. Pengembangan 3 kawasan industri (KI) (dari 14).
4. Perbaiki iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
5. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi.

V. Ketahanan energi

1. EBT dan konservasi energi.
2. Pemenuhan kebutuhan energi.

VI. Ketahanan pangan

1. Peningkatan produksi pangan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi).

VII. Penanggulangan kemiskinan

1. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi.

VIII. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda).
2. Pengembangan telekomunikasi dan informatika.

IX. Pembangunan wilayah (22-26)

1. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
2. Pembangunan perdesaan.
3. Reforma agraria.
4. Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.l Kebakaran hutan)
5. Percepatan pembangunan Papua.

X. Politik, hukum, pertahanan, dan keamanan

1. Penguatan pertahanan.
2. Stabilitas politik dan keamanan.
3. Kepastian Hukum.
4. Reformasi birokrasi

Kesepuluh prioritas nasional di atas bertujuan untuk memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas. Dari kesepuluh prioritas nasional tahun 2018, ***partisipasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendukung 3 prioritas nasional tahun 2018 yaitu kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.***

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

1. Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam lima tahun adalah: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender.

2. Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.

3. Strategi

1. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan kerjasama lintas sektor.
2. Meningkatkan anggaran responsif gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam jabatan politik dan jabatan publik
4. Peningkatan pelayanan PUSPAGA melalui pengasuhan alternatif yang sesuai standar
5. Peningkatan usaha ekonomi yang dikelola perempuan melalui upaya memberdayakan perempuan sebagai kepala keluarga, yang rentan, korban kekerasan, dan disabilitas
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak melalui pengumpulan data kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
7. Meningkatnya predikat KLA melalui pemenuhan 31 indikator KLA
8. Menangani bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
9. Meningkatkan kenyamanan kota untuk tumbuh kembang anak

4. Kebijakan

- a. Penurunan kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO yang fokus pada peningkatan, pencegahan, pelayanan, pemberdayaan korban kekerasan perempuan, dan penguatan lembaga/ jaringan.
- b. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender yang berfokus pada PPRG serta monitoring dan evaluasi pada setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PPRG.
- c. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, legislatif dan jabatan publik
- d. Meningkatnya pelayanan PUSPAGA yang sesuai standar yang berfokus pada pelatihan tenaga terampil dan penguatan kelembagaan PUSPAGA.
- e. Meningkatnya usaha ekonomi yang dikelola perempuan berfokus pada pelatihan keterampilan dan manajemen usaha dan pendampingan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).
- f. Peningkatan kualitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak yang berfokus pada pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
- g. Peningkatan keterlibatan pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) yang berfokus pada peningkatan predikat Kota Layak Anak
- h. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- i. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
- j. Mewujudkan Kota Dumai sebagai kota layak anak

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada

saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016 – 2021 yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI
PADA TAHUN 2021”**

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Masyarakat Dumai yang makmur; keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin.
 - a. Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat
 - b. Lahir: keduniaan; jasmani
 - c. Batin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).
2. Masyarakat Dumai yang madani: Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.
 - a. Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya
 - b. Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
 - d. Berperadaban yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa.
3. Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing yang berarti Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena

manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- 4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian misi ke -4 yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”*** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik.

Analisis permasalahan :

1. IPG Kota Dumai meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. IDG Kota Dumai relatif rendah dibandingkan kondisi ideal, berada pada peringkat 5 dari 12 Kabupaten/Kota se Propinsi Riau.

3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus Kekerasaan Dalam Rumah Tangga.
4. Masih ditemui perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
5. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh.
6. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
8. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak
9. Belum terpenuhinya hak-hak anak yang merata sampai tingkat kelurahan seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.

3.3.1 PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.

Ada 11 (sebelas) program yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
7. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
8. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

9. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
10. Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah
11. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3.3.1 KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Ada 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12. Penyediaan jasa keamanan kantor
13. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
14. Pembangunan gedung kantor
15. Pengadaan peralatan gedung kantor
16. Pengadaan perlengkapan gedung
17. Pengadaan mebeleur

18. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
22. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
23. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
24. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
26. Pendidikan dan pelatihan formal
27. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
28. Perumusan kebijakan peningkatan peran serta dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
29. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
30. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
31. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
32. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
33. Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender
34. Pengembangan system informasi gender dan anak
35. Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
36. Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
37. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
38. Pelatihan bagi (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
39. Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga
40. Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
41. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
42. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

43. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
44. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan

45. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
46. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
47. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
48. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0 | Non Urusan | | | | | | | | |
| 0 1 | Non Bidang Urusan | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor | 100% | 1.327.511.546 | | | 0 | |
| 0.01..001.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota, SKPD | Terlaksananya penyediaan surat menyurat | 1 kegiatan | 5.438.973 | - | | 1 kegiatan | 0 |
| 0.01..001.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota, SKPD | Tersedianya belanja telepon, Belanja air, Belanja Listrik | 12 Bulan | 126.060.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.003 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kota, SKPD | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 19.240.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota, SKPD | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas | 12 Bulan | 26.760.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota, SKPD | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12 Bulan | 171.600.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.010 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota, SKPD | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | 12 Bulan | 85.619.903 | - | | 12 Bulan | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---|--|----------|---|
| 0.01..001.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota, SKPD | Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 73.007.670 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota, SKPD | Tersedianya Komponen listrik / penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 23.000.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | SKPD | Tersedianya Bahan Bacaan Dan Informasi aparatur | 12 Bulan | 15.360.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.017 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota, SKPD | Tersedianya Makan dan Minum Rapat | 12 Bulan | 30.360.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota, SKPD | Tersedianya Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara | 12 Bulan | 621.000.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.019 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya jasa Tenaga keamanan kantor (6 orang) | 12 Bulan | 130.065.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..001.020 | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota, SKPD | Jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (10 orang) | 12 bulan | 196.800.000 | - | | 12 bulan | 0 |
| 0 1 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 2.257.405.551 | | | 0 | |
| 0.01..002.003 | Pembangunan gedung kantor | Kota, SKPD | Tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | 1 gedung | 1.708.035.909 | - | | 1 gedung | 0 |
| 0.01..002.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kota, SKPD | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 3 unit | 45.000.000 | - | | 3 unit | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---|--|----------|---|
| 0.01..002.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kota, SKPD | Tersedianya sarana dan prasarana Kantor | 6 Unit | 80.219.642 | - | | 6 Unit | 0 |
| 0.01..002.010 | Pengadaan mebeleur | Kota, SKPD | Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor | 3 unit | 100.000.000 | - | | 3 unit | 0 |
| 0.01..002.021 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Kota, SKPD | Tersedianya rumah dinas/ kantor yang layak | 1 unit | 9.000.000 | - | | 1 unit | 0 |
| 0.01..002.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota, SKPD | tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional | 12 bulan | 176.080.000 | - | | 12 bulan | 0 |
| | | | Terpenuhinya jasa supir kendaraan Dinas Operasional | 12 bulan | | | | 12 bulan | |
| 0.01..002.026 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kota, SKPD | Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik | 12 Bulan | 14.460.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..002.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kota, SKPD | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik | 12 Bulan | 14.610.000 | - | | 12 Bulan | 0 |
| 0.01..002.041 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Kota, SKPD | Tersedianya sarana kerja yang layak | 1 paket | 10.000.000 | - | | 1 paket | 0 |
| 0.01..002.042 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Kota, SKPD | Tersedianya sarana kerja yang layak | 1 paket | 100.000.000 | - | | 1 paket | 0 |
| 0 1 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | 63.860.000 | | | 0 | |
| 0.01..003.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kota, SKPD | Tersedianya Pakaian Seragam Security | 2 stel | 35.000.000 | - | | 2 stel | 0 |
| 0.01..003.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Kota, SKPD | Tersedianya Pakaian Seragam MTQ | 48 stel | 28.860.000 | - | | 48 stel | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---|--|-----------|---|
| 0 1 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 37.220.000 | | | 0 | |
| 0.01..005.001 | Pendidikan dan pelatihan formal | Kota, SKPD | Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kebutuhan Jabatan | 12 bulan | 14.860.000 | - | | 12 bulan | 0 |
| 0.01..005.003 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Kota, SKPD | Meningkatnya Sumber Daya Manusia tentang Peraturan Perundang-undangan | 12 bulan | 22.360.000 | - | | 12 bulan | 0 |
| 0 1 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan | 4 dokumen | 95.109.500 | | | 0 | |
| 0.01..006.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kota, SKPD | Tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ dan Renstra | 4 Dokumen | 60.275.000 | - | | 4 Dokumen | 0 |
| 0.01..006.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Kota, SKPD | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan | 2 Dokumen | 24.422.000 | - | | 2 Dokumen | 0 |
| 0.01..006.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota, SKPD | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 10.412.500 | - | | 1 Dokumen | 0 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 4 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 4 2 15 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | | Persentase perempuan yang duduk di legislatif | 18% | 169.160.400 | | | 0 | |
| 2.02..015.002 | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Kota, SKPD | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan | 80 orang | 169.160.400 | - | | 80 orang | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---|--|---------------|---|
| 4 2 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat | 85% | 1.982.157.000 | | | 0 | |
| 2.02..016.003 | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | Kota, SKPD | Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan | 1 kegiatan | 419.840.000 | - | | 1 kegiatan | 0 |
| | | | Terlaksananya pendataan gender, dan anak | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | |
| | | | Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | |
| 2.02..016.004 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Kota, SKPD | Terlaksananya KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender | 100 orang | 104.860.000 | - | | 100 orang | 0 |
| 2.02..016.005 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Kota, SKPD | Terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan Forum Anak 2019-2021 | 41 forum anak | 203.000.000 | - | | 41 forum anak | 0 |
| | | | Pembinaan forum anak | 41 Forum anak | | | | 41 Forum anak | |
| | | | Penguatan forum anak | 50 orang | | | | 50 orang | |
| 2.02..016.006 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Kota, SKPD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak | 40 sekolah | 278.000.000 | - | | 50 sekolah | 0 |
| | | | Pembinaan kecamatan layak anak | 7 Kecamatan | | | | 7 Kecamatan | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---|-----------|--------------|---|
| | | | Terselenggaranya bimbingan teknis informasi Layak anak | 40 orang | | | | 40 orang | |
| 2.02..016.007 | Evaluasi pelaksanaan PUG | Kota, SKPD | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) | 100 orang | 156.000.000 | - | | 100 orang | 0 |
| 2.02..016.008 | Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak | Kota, SKPD | Tersedianya Media Informasi | 75 persen | 223.941.000 | - | | 75 persen | 0 |
| | | | Tersedianya Profil data Gender dan Anak serta Kelembagaan Perempuan dan Anak | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | |
| 2.02..016.013 | Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Kota, SKPD | Terlaksananya Pendampingan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak | 120 Kasus | 330.016.000 | - | | 120 Kasus | 0 |
| 2.02..016.014 | Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak | Kota, SKPD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | 25 kelurahan | 266.500.000 | - | | 25 kelurahan | 0 |
| | | | Terselenggaranya bimbingan teknis konvensi hak anak | 50 orang | | | 80 orang | | |
| | | | Terselenggaraanya bimtek replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | 80 orang | | | 90 orang | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---|--|-----------|---|
| 4 2 17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan | 85% | 702.523.325 | | | 0 | |
| 2.02..017.001 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | Kota, SKPD | Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan | 100 orang | 176.310.000 | - | | 100 orang | 0 |
| | | | Terselenggaranya pembinaan perempuan dan anak korban kekerasan | 30 orang | | | | 30 orang | |
| 2.02..017.002 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | Kota, SKPD | Terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | 150 orang | 118.319.000 | - | | 150 orang | 0 |
| 2.02..017.011 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | Kota, SKPD | Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | 100 orang | 112.894.325 | - | | 100 orang | 0 |
| 2.02..017.013 | Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | Kota, SKPD | terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di Kelurahan | 100% | 295.000.000 | - | | 100% | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---|--|---------------|---|
| 4 2 18 | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai | 70% | 763.791.450 | | | 0 | |
| 2.02..018.001 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Kota, SKPD | Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan | 45 organisasi | 447.500.000 | - | | 45 organisasi | 0 |
| | | | Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu | 2 kegiatan | | | | 2 kegiatan | |
| 2.02..018.003 | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Kota, SKPD | Terlaksananya penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga | 7 Kecamatan | 165.788.450 | - | | 7 Kecamatan | 0 |
| | | | Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai | 33 kelurahan | | | | 33 kelurahan | |
| 2.02..018.004 | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Kota, SKPD | Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | 7 kecamatan | 150.503.000 | - | | 7 kecamatan | 0 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 3 1 | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | |
| 3 1 35 | Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | | Persentase tersedianya informasi Pemerintah Daerah | 80% | 100.000.000 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|--|------------|----------|
| 4.01..035.003 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | Kota, SKPD | Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha | 3 kegiatan | 100.000.000 | - | | 3 kegiatan | 0 |
| 3 4 | Keuangan | | | | | | | | |
| 3 4 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Dokumen aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata | 2 Dokumen | 30.000.000 | | | 0 | |
| 4.04..017.016 | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah | Kota, SKPD | peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah | 2 dokumen | 30.000.000 | - | | 2 dokumen | 0 |
| TOTAL | | | | | 7.725.538.772 | | | | 0 |

Dumai, 24 September 2020
KEPALA,



DAMERIA, SKM, M. Si
NIP. 19640605 198603 2 006

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

BAB IV
RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI TAHUN 2021

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | Volume | Anggaran |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Urusan Pemberdayaan Perempuan | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kota Dumai | Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi | 100% | 1.524.311.546 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | OPD | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Bulan | 5.438.973 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | OPD | Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik | 12 Bulan | 126.060.000 |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | OPD | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 19.240.000 |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | OPD | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas | 12 Bulan | 26.760.000 |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | OPD | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 171.600.000 |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | OPD | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | 12 Bulan | 85.619.903 |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | OPD | Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 73.007.670 |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | OPD | Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 23.000.000 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 9 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | OPD | Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur | 12 Bulan | 15.360.000 |
| 10 | Penyediaan makanan dan minuman | OPD | Tersedianya makan dan minum rapat | 12 Bulan | 30.360.000 |
| 11 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | OPD | Tersedianya fasilitasi pendukung perjalanan dinas bagi aparatur (Bulan) | 12 Bulan | 621.000.000 |
| 12 | Penyediaan jasa keamanan kantor | OPD | Tersedianya tenaga pengamanan kantor (2 orang) | 12 Bulan | 130.065.000 |
| 13 | Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran | OPD | Jumlah tenaga jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (3 orang) | 12 Bulan | 196.800.000 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kota Dumai | Persentase ketersediaan saran dan prasarana aparatur | 100% | 2.257.405.551 |
| 1 | Pembangunan gedung kantor | Kota.SKPD | Tersedianya gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | 1 gedung | 1.708.035.909 |
| 1 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kota.SKPD | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | 6 Unit | 80.219.642 |
| 2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kota.SKPD | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 3 unit | 45.000.000 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota.SKPD | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 12 Bulan | 176.080.000 |
| | | | Terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas | 12 bulan | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kota.SKPD | Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik | 12 Bulan | 14.460.000 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kota.SKPD | Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik | 12 Bulan | 14.610.000 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 6 | Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas | Kota.SKPD | Terpeliharanya rumah dinas | 1 Unit | 9.000.000 |
| 7 | Pengadaan mebeleur | Kota.SKPD | Tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor | 3 Unit | 100.000.000 |
| 8 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Kota.SKPD | Tersedianya sarana kerja yang layak | 1 paket | 100.000.000 |
| 9 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Kota.SKPD | Tersedianya sarana kerja yang layak | 1 paket | 10.000.000 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Kota Dumai | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | 63.860.000 |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kota.SKPD | Tersedianya pakaian seragam security | 2 stel | 35.000.000 |
| 2 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Kota.SKPD | Tersedianya pakaian seragam MTQ | 48 stel | 28.860.000 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kota Dumai | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 37.220.000 |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Kota.SKPD | Tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi standar kebutuhan jabatan (Bulan) | 12 bulan | 14.860.000 |
| 2 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Kota.SKPD | Meningkatnya sumber daya manusia tentang peraturan perundang-undangan (Bulan) | 12 bulan | 22.360.000 |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kota Dumai | Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan | 4 Dokumen | 95.109.500 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kota.SKPD | Tersusunnya dokumen LKj-IP, LPPD, LKPJ dan Renstra | 4 Dokumen | 60.275.000 |
| 2 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Kota.SKPD | Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan Perubahan | 2 Dokumen | 24.422.000 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota.SKPD | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 10.412.500 |
| VI | Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Kota Dumai | Persentase perempuan yang duduk di legislatif | 18% | 169.160.400 |
| 1 | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Kota.SKPD | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas politik perempuan | 80 orang | 169.160.400 |
| VII | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Kota Dumai | Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada , masyarakat | 83% | 1.982.157.000 |
| 1 | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | Kota.SKPD | Terselenggaranya peningkatan kapasitas organisasi perempuan (Kegiatan) Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak (dokumen) Terlaksananya pendataan gender, dan anak (dokumen) | 1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen | 419.840.000 |
| 2 | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Kota.SKPD | Terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | 100 orang | 104.860.000 |
| 3 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Kota.SKPD | Terselenggaranya pembinaan Forum Anak Kota Dumai | 50 orang | 203.000.000 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 4 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak | Kota.SKPD | Terselenggaranya pembinaan Puskesmas Ramah Anak Terselenggaranya Rakor Kota Layak Anak Terselenggaranya pembinaan Sekolah Ramah Anak | 30 Orang 50 20 Sekolah | 278.000.000 |
| 5 | Evaluasi pelaksanaan PUG | Kota.SKPD | Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) (orang) | 20 orang | 156.000.000 |
| 6 | Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak | Kota.SKPD | Tersedianya media informasi (persentase) Tersedianya Profil data Gender dan Anak serta Kelembagaan Perempuan dan Anak(Dokumen) | 75 persen 1 dokumen | 223.941.000 |
| 7 | Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Kota.SKPD | Terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak Terlaksananya peningkatan kapasitas manajer kasus SDM pendamping dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | 80 Kasus 5 Orang | 330.016.000,00 |
| 8 | Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak | Kota.SKPD | Terselenggaranya bimtek pembinaan aktifis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Terselenggaranya bimtek replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) | 250 Orang 50 Orang | 266.500.000 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| VIII | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Kota Dumai | Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan | 85% | 702.523.325 |
| 1 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | Kota.SKPD | Pelatihan keterampilan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan (orang) | 50 orang | 176.310.000 |
| 2 | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | Kota.SKPD | Telaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT (orang) | 120 orang | 118.319.000 |
| 3 | Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga | Kota.SKPD | Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga Terlaksananya Forum koordinasi kesetaraan gender | 20 Orang 0 Orang | 112.894.325 |
| 4 | Pencegahan dan perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | Kota.SKPD | Terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan | 20 Kelurahan | 295.000.000 |
| IX | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Kota Dumai | Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota Dumai | 70% | 763.791.450 |
| 1 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Kota.SKPD | Terlaksananya peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu (Kegiatan) Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan (organisasi) | 2 kegiatan 35 organisasi | 447.500.000 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2 | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Kota.SKPD | Terlaksananya penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga (kecamatan) Terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai (10 Kelurahan per tahun) | 7 kecamatan 10 kelurahan | 165.788.450 |
| 3 | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Kota.SKPD | Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | 7 Kecamatan | 150.503.000 |
| X | Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | Kota Dumai | Persentase tersedianya informasi pemerintah daerah | 78% | 100.000.000 |
| 1 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/Daerah/Keagamaan | Kota.SKPD | Terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling idul fitri dan idul adha (Kegiatan) | 3 Kegiatan | 100.000.000 |
| XI | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kota Dumai | Dokumen aset milik perangkat daerah yang terpelihara dan terdata | 2 dokumen | 30.000.000 |
| 1 | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah | Kota.SKPD | Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah | 2 dokumen | 30.000.000 |
| TOTAL | | | | | 7.725.538.772 |

Dumai, 24 September 2020
Kepala,



DAMERIA SKM, M. Si
NIP.19640605 198603 2 006

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Berdasarkan analisa SWOT, tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Strengths (S) / Kekuatan :
 - a. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - b. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
 - c. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2. Weakness (W) / Kelemahan :
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
 - b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan serta penganggaran responsif gender
 - c. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Opportunities (O) / Peluang :
 - a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
 - b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender.
 - c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan kesepakatan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030.
 - e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Threats (T) / Ancaman :
- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM serta laporan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
 - b. Rendahnya keberdayaan masyarakat dalam implementasi PUG
 - c. Rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga yang dicapai oleh kabupaten/ kota
 - d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO serta rendahnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO;
 - e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan responsif gender termasuk penyediaan data gender dan anak

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur indikator masukan (input), proses (process),

keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator masukan (input) adalah gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).

Indikator proses (process) adalah gambaran mengenai langkah langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekwensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan atau standar).

Indikator keluaran (output) adalah gambaran mengenai output dan bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

Indikator hasil (outcome) adalah gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan peningkatan pendapatan).

Indikator dampak (impact) adalah gambaran akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan atau indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang didasarkan pada upaya pencapaian sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Melalui rencana kinerja berbagai kegiatan tahunan dapat disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan, yaitu :

| No | MISI KOTA DUMAI | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Misi ke-4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak-hak anak | 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan 3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar 4. Capaian Kota Layak Anak 5. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO |

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit Organisasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Spesifik ;
- b. Dapat dicapai ;
- c. Relevan ;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur ;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Prinsip-prinsip pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi, guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Diharapkan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat teratasi.

LAMPIRAN

**PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
SANDINGAN DENGAN PAGU RENSTRA , RENJA TAHUN 2021**

| PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPJ / RENJA | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|---------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|------|--------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----|----|------|----|
| URUSAN | | | | | | PROGRAM | | | | KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (RENTA / RENSTRA) | | SUB KEGIATAN | | INDIKATOR SUB KEGIATAN | | PAGU SUB KEGIATAN (Rp) | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | | | |
| KODE REKENING (DPA) | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | PAGU RENSTRA 2021 (Rp) | PAGU RANCANGAN AKHIR RENJA 2021(Rp) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (RENTA / RENSTRA) | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | PAGU SUB KEGIATAN (Rp) | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET | PAGU SUB KEGIATAN (Rp) | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM | KODE | URUSAN | URUSAN | URUSAN | URUSAN | URUSAN | URUSAN | URUSAN | URUSAN | URUSAN | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 01 | Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan | Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 36,275,000 | 60,275,000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Dokumen LKJ, LKPJ, LPPD, dan RENSTRA (4 Dokumen) | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan (2 dokumen) | 18,000,000 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah a. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor 2. Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | 08 | 01 | 2 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan | 3 | Dokumen | 18,000,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (3 Dokumen) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 06 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 04 | 01 | 35 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 02 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 01 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 16 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 2 | 02 | 01 | 18 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

